

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Moratorium Pembangunan.....	13
2.2 Kebijakan Publik.....	18
2.3 Implementasi Kebijakan: Ambiguitas - Konflik.....	24
2.4 Operasionalisasi Konseptual	34
2.5 Kerangka Pikir Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	42
3.2.1 Ruang Lingkup Substansial.....	42
3.2.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	43
3.3 Sumber Data.....	44
3.3.1 Data Primer.....	44

3.3.2 Data Sekunder.....	46
3.4 Informan dan Teknik Penetapan Informan.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5.1 Observasi.....	48
3.5.2 Dokumentasi	48
3.5.3 Wawancara.....	49
3.6 Validitas Dan Keabsahan Data.....	52
3.7 Analisa Data.....	53
BAB IV DESKRIPSI KONTEKS PENELITIAN.....	54
4.1 Profil Kabupaten Sleman.....	54
4.2 Perkembangan Pariwisata Dan Kontribusi Usaha Perhotelan.....	59
4.3 Tinjauan Umum Usaha Apartemen Di Kabupaten Sleman.....	66
4.4 Peluang Investasi Kondotel.....	72
4.5 Kajian Kebijakan Moratorium Di Kabupaten Sleman.....	73
BAB V PEMBAHASAN.....	77
5.1. Pengantar.....	77
5.2 Ambiguitas Tujuan Kebijakan.....	78
5.2.1 Analisis Konten Kebijakan Moratorium.....	78
5.2.1.1 Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2015.....	79
5.2.1.2 Berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2016.....	81
5.2.1.3 Analisis Ambiguitas Dalam Kebijakan Moratorium.....	91
5.2.2 Pemahaman Aktor Terhadap Kebijakan.....	92
5.2.3 Interpretasi Tujuan Kebijakan.....	93
5.3 Dampak Ambiguitas Dalam Kebijakan Moratorium.....	95
5.3.1 Menstimulus Peningkatan Permohonan Perizinan.....	96
5.3.2 Munculnya Fenomena Jual - Beli Perizinan.....	101
5.3.3 Ketidaksesuaian Izin Dengan Realitas Lapangan.....	102
5.3.4 Permainan Nomenklatur Permohonan Perizinan.....	104
5.4 Prosedur Dan Perubahan Nomenklatur Dalam Tahapan Perizinan.....	105

5.4.1 Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.....	109
5.4.2 Pencabutan dan Perubahan Nomenklatur Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.....	111
5.4.3 Tahap Awal Pengajuan Izin Usaha Baru Di Kabupaten Sleman.....	114
5.5 Ambiguitas Sarana Dalam Proses Implementasi Kebijakan.....	119
5.5.1 Kesesuaian Kebijakan Dengan Lembaga Pelaksana Kebijakan.....	120
5.5.2 Ketersediaan Pelaksana Kebijakan.....	122
5.5.3 Kepatuhan Pelaksana Kebijakan.....	124
5.5.3.1 Pemerintah Menerbitkan 9 Izin Baru Yang Diajukan Sebelum Penetapan Kebijakan moratorium.....	125
5.5.3.2 Pemerintah Menerbitkan 2 Izin Baru Di luar Kawasan Moratorium.....	127
5.5.3.3 Pemerintah Tetap Menerbitkan 4 Izin Usaha Baru Yang Diajukan Saat Moratorium.....	129
5.6 Pertumbuhan Hotel Virtual Tanpa Izin.....	132
5.7 Perubahan Kebijakan Moratorium 2020: <i>Outsmarting Policy?</i>	136
5.8 Ringkasan dan Temuan Penelitian.....	140
BAB VI PENUTUP.....	146
6.1 Kesimpulan.....	146
6.2 Rekomendasi.....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	150

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1 Kontribusi Terhadap Studi Implementasi	26
Tabel 2.2 Perbedaan Top – Down dan Bottom – Up Dalam Implementasi	28
Tabel 2.3 Model Matland: Ambiguitas, Konflik dan Implementasi	29
Tabel 2.4 Operasionalisasi Konseptual Konflik – Ambiguitas Matland	35
Table 3.1 Penggalian Keterangan Dari Informan	50
Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Sleman, Tahun 2016 – 2018	57
Tabel 4.2 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2015 - 2018	58
Tabel 4.3 Peringkat IPI Berdasarkan Elemen Penawaran Wisata, Tahun 2018	62
Tabel 4.4 Peringkat IPI Berdasarkan Persepsi Publik, Tahun 2018	62
Tabel 4.5 Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Sleman, Tahun 2014 - 2018	63
Tabel 4.6 Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Sleman, Tahun 2014 – 2018	63
Tabel 4.7 Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Di Kabupaten Sleman, Tahun 2014 - 2018	64
Tabel 4.8 Banyaknya Hotel dan Penginapan Lainnya, Kamar dan Tempat Tidur Di Kabupaten Sleman	65
Tabel 4.9 Daftar dan Jumlah Unit Apartemen Di Kabupaten Sleman	69
Tabel 4.10 Rekapitulasi Unit Apartemen Di Kabupaten Sleman, Januari 2018	70
Tabel 5.1 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang Di Kecamatan Turi, Pakem dan Cangkringan, Tahun 2016 - 2017*	80
Tabel 5.2 Pengajuan Perpanjangan Izin Untuk Hotel, Apartemen dan Kondotel Di Kab. Sleman, Tahun 2016 – 2019	87

Tabel 5.3 Pengajuan Permohonan Izin Untuk Sarana dan Prasarana Hotel, Apartemen dan Kondotel Di Kab. Sleman, Tahun 2016 – 2019	90
Tabel 5.4 Rekapitulasi Permohonan Izin Baru Untuk Pembangunan Hotel, Apartemen dan Kondotel Di Kabupaten Sleman	97
Tabel 5.5 Jenis Permohonan Izin Usaha Baru Setelah Penerbitan Kebijakan Moratorium, Tahun 2016 – 2017	98
Tabel 5.6 Rekapitulasi Permohonan Izin Baru Sebelum dan Setelah Penerbitan Kebijakan Moratorium, Tahun 2014 - 2019	99
Tabel 5.7 Permohonan Perizinan Yang Diterbitkan Pada Saat Moratorium	126
Tabel 5.8 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Sleman	127
Tabel 5.9 Penerbitan Izin Diluar Kawasan Moratorium	128
Tabel 5.10 Permohonan dan Penerbitan Yang Terindikasi Melanggar	129

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1 Peningkatan Hotel Bintang di D.I Yogyakarta	3
Grafik 1.2 Peningkatan Hotel Non Bintang di D.I Yogyakarta	3
Grafik 4.1 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan	55
Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk	55

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sleman	54
Gambar 4.2 Peta Persebaran Apartemen Di DIY	71